

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM
PELAPORAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

AINUN AQILA
NIM : 4319073

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, SISTEM
PELAPORAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN
KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA SKPD
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

AINUN AQILA
NIM : 4319073

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Aqila

NIM : 4319073

Judul Skripsi : **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kabupaten Batang**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Mei 2023



A handwritten signature in black ink is placed over a yellow watermark of a 1000 Rupiah Indonesian banknote. The signature is cursive and appears to read 'Ainun Aqila'. The watermark includes the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'TEMBAK'.

Ainun Aqila

NOTA PEMBIMBING

Syamsuddin, M.Si

Ds. Bandung RT 02 RW 04, Kec. Pecalungan Kab. Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdr. Ika Masruroh

Yth.

Dekan Fakultas dan Ekonomi Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan sepenuhnya, maka bersama ini saya

kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ainun Aqiila

NIM : 4319073

Judul Skripsi : **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kabupaten Batang**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Juni 2023

Pembimbing



Syamsuddin, M.Si

NIP.199002022019031011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : Ainun Aqiila

NIM : 4319073


Judul Skripsi : **Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan,
Pengendalian Akuntansi dan Ketaatan Pada peraturan
Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD
Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2023 dan dinyatakan
LULUS serta dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Prof. Dr. Hj Susminingsih, M.Ag
NIP. 197502111998032001


Ina Mutmainah, M.Ak
NIP. 199203312019032007

Pekalongan, 17 Juni 2023
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

“Katakanlah (Nabi Muhammad), Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya dan orang-orang akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberikan kepada kamu yang selama ini kamu kejakan ”

(Qs. At-taubah 11:105)

“Janganlah lari dari tanggung jawab dengan mencari alasan (pembenaran) kerana ia merupakan bagian dari kemusyrikan yang tersembunyi”

(Rasulullah SAW)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini. Besar harapan semoga skripsi ini dapat menjadi bekal untuk masa depan dan bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta. Bapak Ibnu Hajar dan Ibu Suniah yang tidak henti memberikan kasih sayang, membiayai, mendukung, dan mendoakan perjalanan kuliah saya hingga penyelesaian skripsi.
2. Keluarga saya, kakak tersayang Hilman Hadafi dan Nur Azizah, serta keponakan saya Muhammad Hafidz Al Fajri.
3. Sahabat seperjuangan Akuntansi Syariah selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi Fatkhul Ilmi, M. Izzul Haq, dan Fiki Nur Fajrina yang telah kebersamai dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Syamsuddin, M.Si yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen Wali, Bapak H. Muhammad Nasrullah, M.Si yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019 yang telah menemani sepanjang masa perkuliahan.

ABSTRAK

AINUN AQILA. Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Batang.

Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan oleh lembaga publik yang melaksanakan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, serta pelaporan informasi kinerja. Berdasarkan grafik realisasi kinerja dari tahun 2017-2021 SKPD Kabupaten Batang mengalami peningkatan namun dengan skor yang hanya bisa mendapatkan predikat B yang artinya dapat dikaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh perencanaan anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Batang dengan total sampel 67 responden. Teknik pengambilan sampel berupa *purposive sampling* dengan kriteria kepala SKPD, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan bendahara pengeluaran dari 27 SKPD. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu instrumen penelitian, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS 26.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja sedangkan perencanaan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Batang.

Kata kunci : perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Akuntabilitas Kinerja.

ABSTRACT

AINUN AQILA. The Influence of Budget Planning, Reporting Systems, Accounting Control, and Compliance with Legislation on the Performance Accountability of SKPD Batang Regency.

Performance Accountability is carried out by public institutions that carry out performance recording, processing, summarizing, and reporting. Based on the graph of performance realization from 2017-2021 the SKPD of Batang Regency has increased but with a score that can only get the title B, which means that factors that can influence Performance Accountability can be studied. This research was conducted with the aim of examining the effect of budget planning, reporting systems, accounting controls, and compliance with laws and regulations on performance accountability.

This research is included in field research using a quantitative approach. The object of this research is the SKPD of Batang Regency with a sample of 67 respondents. The sampling technique was in the form of purposive sampling with the criteria of the head of the SKPD, the Planning and Finance Section, and the Expenditure treasurer of 27 SKPD. This study uses data analysis methods, namely instrument research, classical assumption test, coefficient of determination, multiple regression analysis, and hypothesis testing with the help of the SPSS 26 application.

The results of this study indicate that reporting systems and accounting controls have an effect on performance accountability, while budget planning and compliance with laws and regulations do not affect SKPD performance accountability in Batang Regency.

Keywords: Budget Planning, Reporting System, Accounting Control, Compliance with Legislation, Performance Accountability.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Risawati, M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Tamammudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Ria Anisatus Sholihah, M.S.A selaku Sekretaris program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Syamsuddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
7. Bapak H. Muhammad Nasrullah, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).

8. Segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang telah mendukung penelitian saya hingga selesai.
9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan material dan moral.
10. Sahabat saya, Ilmi, Izzul, Fiki yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat selama masa perkuliahan hingga penelitian ini.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi Syariah angkatan 2019.
12. Teman-teman Organisasi saya HMJ Akuntansi Syariah, PMII Rayon FEBI, dan Tax Center yang telah menjadi tempat brproses saya selama menjadi mahasiswa.

Akhir kata, saya berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah berkenan membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 30 Mei 2023

Penulis,



Airun Aqila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Landasan Teori	13
1. Teori Agency (Keagenan).....	13
2. Teori Good Governance	14
3. Filosofi Akuntansi Syariah	15
4. Akuntabilitas Kinerja.....	17
5. Perencanaan Anggaran	20
6. Sistem Pelaporan	21
7. Pengendalian Akuntansi	22
8. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	24
B. Telaah Pustaka	26
C. Kerangka Berpikir.....	38

D. Hipotesis	38
BAB III MEOTODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Setting Penelitian	42
D. Populasi dan Sampel Penelitian	43
E. Variabel Penelitian.....	45
F. Sumber Data	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	47
H. Analisis Deskriptif	48
I. Metode Analisis Data.....	48
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum.....	53
B. Deskripsi Data.....	53
C. Statistik Deskriptif	55
D. Analisis Data.....	63
E. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Keterbatasan Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	I

TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu,	26
Tabel 3.1 Daftar SKPD Kabupaten Batang,	44
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel,	45
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner,	53
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin,	53
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan,	54
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan,	55
Tabel 4.5 Rata-rata Jawaban Indikator Variabel X1,	55
Tabel 4.6 Rata-rata Jawaban Indikator Variabel X2,	57
Tabel 4.7 Rata-rata Jawaban Indikator Variabel X3,	58
Tabel 4.8 Rata-rata Jawaban Indikator Variabel X4,	60
Tabel 4.9 Rata-rata Jawaban Indikator Variabel Y,	61
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas,	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas,	65
Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas,	66
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikolinieritas,	67
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedstisitas,	68
Tabel 4.15 Koefesien Determinasi,	69
Tabel 4.16 Analisis Regresi Linier Berganda,	69
Tabel 4.17 Hasil Uji T,	72
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian,	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Kinerja Kabupaten Batang Tahun 2017-202, 5

Gambar 2.1 Model Penelitian, 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Setiap daerah di Indonesia diberikan otonomi untuk menjalankan pemerintahannya secara independen. Pemerintah daerah bertanggungjawab menjalankan tugas dan wewenang yang menyelenggarakan kehidupan ekonomi, politik, dan sosial pada setiap daerah masing-masing. Setiap instansi pemerintah, dalam melaksanakan tanggungjawabnya harus berdasarkan akuntabilitas termasuk dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Perpres No. 29 Tahun 2014 membahas terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana akuntabilitas kinerja dilaksanakan lembaga publik yang melaksanakan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, serta pelaporan informasi kinerja tingkatan kementerian/ lembaga. Pemerintah daerah Sebagai lembaga sektor publik, diminta untuk mengupayakan dalam memberikan layanan terbaik, transparan, dan berkualitas tinggi dengan tetap mengarah pada kinerja yang berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Akuntabilitas berfokus pada standar kinerja seseorang berdasarkan harapan masyarakat atau yang didalam islam disebut kemaslahatan umat sehingga dapat digunakan dalam penilaian sesuatu yang penting seperti kinerja, tingkat kemampuan dalam menunjukkan keselarasan antara progam dan kegiatan, serta moralitas dari petugas pemerintahan dalam melayani kepentingan publik dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Akuntabilitas

menjadi penting karena masyarakat perlu mengetahui penggunaan dan pengelolaan sumber daya publik Rininda & Sudaryati (2020). Menurut (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2011) Akuntabilitas merupakan komitmen dalam memaparkan pelaporan atas pertanggungjawaban kinerja secara periodik atas tindakan atau pekerjaan yang telah diberikan oleh suatu organisasi maupun individu terhadap pihak yang mempunyai wewenang untuk memperoleh laporan dan pertanggungjawaban informasi baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara relevan, akurat, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas kinerja juga dijelaskan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

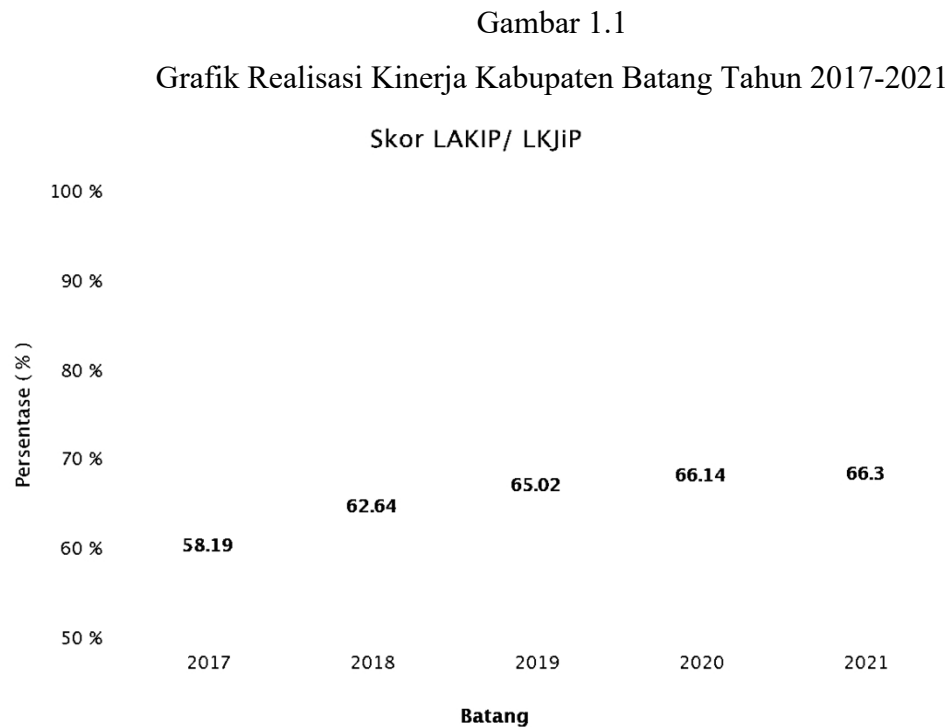
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mensyariatkan kita untuk menjalankan amanat yang ditangguhkan pemiliknya dan kita tidak diperkenankan untuk melalaikan amanat tersebut. Ayat tersebut ditujukan untuk seluruh manusia dalam menunaikan segala amanah, terutama bagi para pemimpin yang memiliki kekuasaan sehingga wajib bagi mereka menjalankan amanah dan menjauhi keburukan, senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah berikan atas amanat yang diemban

dalam kebijakan-kebijakannya. Termasuk didalamnya perintah mengenai kehati-hatian dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan kabar berita (laporan). Hal ini bisa dimaksudkan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah. Prinsip keadilan yang terdapat di atas memang sangat penting, karena Qardhawi juga menyatakan ruh sistem Islam adalah pertengahan yang adil. Keadilan disini mengandung maksud kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. (Muhamad, 2016)

Perwujudan pertanggungjawaban dari pemerintah atas kinerja instansi pemerintah kemudian dikembangkan, disusun dan dipaparkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa disebut LAKIP. Dokumen tersebut dapat dijadikan tolak ukur sebuah SKPD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan. Proses penyusunan LAKIP memerlukan pedoman penyusunan sehingga LAKIP yang disusun dapat dilaporkan dengan penuh pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Rio, 2019). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Kesepakatan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Pemerintah Daerah maupun SKPD diharuskan melakukan penyusunan LAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan program setiap tahunnya.

Proses evaluasi Satuan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan setiap tahun dengan melewati beberapa tahapan. Ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu pra-evaluasi, evaluasi mendalam, dan penyampaian hasil. Setiap pemerintah maupun SKPD akan mendapatkan predikat setelah evaluasi dilaksanakan. Ada tujuh predikat penilaian diantaranya: (1) AA dengan rentang nilai >90-100 yang berarti sangat memuaskan. SKPD yang mendapatkan predikat tersebut berarti telah mewujudkan *Good Governance*, seluruh kinerja dikelola oleh seluruh bagian kerja, pemerintahan yang fungsional, mampu beradaptasi dengan baik, dan efisien telah terbentuk. Tingkat individu telah dicapai dalam pengukuran kinerja. (2) A dengan rentang nilai >80-90 yang berarti memuaskan. Instansi pemerintah telah dapat berorientasi pada hasil dan level kinerja telah diukur sampai kepangkatan 4/pengawas/sub koordinator. (3) BB dengan rentang nilai >70-80 yang berarti Sangat Baik. Akuntabilitas instansi pemerintah sangat baik sehingga mewujudkan manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang handal. Pengukuran kinerja pada predikat ini sampai ke level pangkat 3/ kepala bidang. (4) B dengan rentang nilai >60-70 yang berarti Baik. Perlu adanya sedikit rektifikasi bagian dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan pada pangkat 2/unit kerja. (5) CC dengan rentang skor >50-60 yang berarti Cukup (Memadai). Perlu banyak perbaikan khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. (6) C dengan rentang nilai >30-50. yang berarti kurang. Pada nilai ini keandalan sistem dan struktur AKIP masih minim sehingga perlu dilakukan banyak perbaikan.

(7) D dengan rentang skor >0-30 yang berarti sangat kurang. Ketika mendapatkan predikat ini tentu sistem AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan sehingga perlu dilakukan perbaikan yang sifatnya sangat mendasar.



Sumber: SIDASA- Kabupaten Batang

Pada grafik realisasi kinerja pemerintah Kabupaten Batang dari tahun 2017 sampai 2021 memperlihatkan bahwa baik target maupun realisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari grafik skor LAKIP Kabupaten Batang menyebutkan bahwa nilai SAKIP setiap tahun mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2017 mendapatkan nilai 58,19 dengan peringkat CC. Selanjutnya pada tahun 2018 mendapatkan nilai 62.64 dengan peringkat B dan tahun 2019 mendapatkan nilai 65.02 dengan peringkat B. Selanjutnya pada tahun 2020

mendapatkan nilai 66.14 dengan predikat B, dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai 66.03 dengan predikat B. Meskipun setiap tahun mengalami peningkatan, tetapi nilai yang didapatkan belum cukup memuaskan karena hanya bisa sampai mendapatkan predikat nilai B. Hasil tersebut tentu memerlukan telaah secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan akuntabilitas kinerja SKPD di Kabupaten Batang.

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, menghasilkan terdapat beberapa aspek yang berpengaruh dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang pertama adalah perencanaan anggaran. Dalam UU No.25 Tahun 2004, Perencanaan anggaran merupakan tahapan dalam menentukan tindakan di masa depan, melalui rencana strategis dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. perencanaan merupakan tahapan paling riskan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena dalam menentukan seluruh kebutuhan anggaran untuk setiap program atau kegiatan ditentukan dalam perencanaan, sehingga terealisasinya anggaran suatu kegiatan berawal dari perencanaannya (Oktavima, 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh zainab pada tahun 2020, terdapat beberapa elemen dasar perencanaan, yaitu: perencanaan meliputi pemilihan sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan suatu tujuan, pengalokasian sumber daya, pencapaian tujuan, dan perencanaan masa depan.

Aspek selanjutnya adalah sistem pelaporan. Pada Perpres RI No. 29 tahun 2014, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menggambarkan terlaksananya misi organisasi serta pengungkapan semua

kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya Pemerintah. Sistem pelaporan dapat dikatakan baik apabila dalam pelaksanaannya dilaksanakan proses pengamatan dan pengendalian terhadap manajerial. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan laporan yang berkaitan dengan keuangan maupun data lain yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dalam mengambil keputusan sosial, ekonomi, dan politik Mulya & Fauzihardani, (2022). Menurut Harianto et al., (2021) sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan menurut riset yang dilakukan Rininda & Sudaryati, (2020) sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Aspek selanjutnya adalah pengendalian Akuntansi. Pengendalian akuntansi dinilai sebagai proses dan sistem formal yang menggunakan informasi Mulya & Fauzihardani (2022). Pengendalian akuntansi memiliki peran penting sebagai perencanaan dan prosedur monitoring berdasarkan informasi untuk mencapai tujuan. Menurut Mulya & Fauzihardani (2022) pengendalian akuntansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan riset yang dilaksanakan oleh Harianto et al., (2021) jika pengendalian akuntansi memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Aspek selanjutnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Kepatuhan setiap lembaga terhadap regulasi diharapkan dapat membuat hasil laporan

akuntabilitas yang selaras dengan kebutuhan informasi publik. Peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2007 menjelaskan bahwa, penyusun laporan keuangan termasuk neraca dan laporan arus kas wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah. Oktaviani (2020), ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi. Perbedaan terlihat dari riset yang dilakukan oleh Zachari Abdallah yang mengemukakan ketatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya berbagai fenomena terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ada di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada Kabupaten Batang serta perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada SKPD Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?
2. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?

4. Apakah Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.
- b. Menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.
- c. Menganalisis Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.
- d. Menganalisis Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada SKPD Kabupaten Batang.

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

1) Akademis

Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap wacana kajian mengenai akuntabilitas kinerja pada SKPD

2) Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai perencanaan anggaran, sistem pelaporan pengendalian akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Serta

dapat menambah pengetahuan tentang aspek yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada SKPD.

b. Praktis

1) Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi referensi masyarakat untuk mengetahui keterbukaan informasi terkait akuntabilitas kinerja SKPD Kabupaten Batang.

2) Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi mengenai akuntabilitas kinerja, sehingga kedepannya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dibuktikan dengan meningkatnya predikat hasil evaluasi kinerja SKPD Kabupaten Batang.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi dalam penelitian yang telah disesuaikan berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022. Sistematika penulisan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian tentang Perencanaan Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, dan Ketaatan Pada

Peraturan Perundangan. Terdapat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk kalimat tanya mengenai penelitian tersebut. Kemudian terdapat tujuan penelitian yang merupakan hal spesifik yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian menggambarkan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun teoritis.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan tentang teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian yang dilakukan dan digunakan sebagai acuan untuk memecahkan rumusan masalah. Dalam landasan teori juga terdapat kerangka berpikir dan hipotesis yang digunakan untuk menguji kebenaran teori, mendorong munculnya teori, dan menerangkan fenomena sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang terdiri dari jenis penelitian, setting penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis atas pengolahan data penelitian yang diperoleh pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang dan pembahasan atas interpretasi dari hasil penelitian secara sederhana dalam menjawab permasalahan pokok dalam rumusan masalah.

BAB V SIMPULAN

Bagian simpulan diambil berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian, serta memuat keterbatasan penelitian yang dilakukan dan saran-saran bagi peneliti yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Perencanaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
2. Sistem Pelaporan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
3. Pengendalian Akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja.
4. Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel perencanaan anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan, sementara itu masih terdapat banyak variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja seperti variabel kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal.
2. Penelitian ini belum sepenuhnya bisa memotret hasil penelitian karena terdapat beberapa kepala SKPD yang melimpahkan pengisian kuesioner kepada bagian perencanaan dan keuangan.

3. Hasil pengumpulan data menggunakan kuesioner dinilai kurang efektif karena kesibukan responden, sehingga responden kurang maksimal dalam menjawab setiap butir pertanyaan yang diberikan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan metode penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik, Gava Media*: Yogyakarta.
- Azwar, Saifudin. 2007. *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*: Yogyakarta.
- Anwar Sanusi. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat*: Jakarta Selatan
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Raja Grafindo Persada* : Jakarta
- Muhamad. 2016. *Akuntansi Syariah. UPP STIM YKPN*: Yogyakarta
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat 1. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Undang-undang (UU) No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Bupati Batang Nomor 72 Tahun 2021 tentang teknik penyusunan sistem akuntabilitas pemerintah dilingkungan pemerintah Kabupaten Batang. Kabupaten Batang
- Aprilianti, D., Wulan, M., & Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 150–159. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.454>
- Mutimah. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Jawa Tengah). *Thesis Universtas Satya Negara Indonesia*. <http://repo.usni.ac.id/163/>
- syidiq. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan, dan pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten BREBES). *Thesis Universitas Marcu Buana*. <https://repository.mercubuana.ac.id/56334/>
- Dewata, E., Sari, Y., Jauhari, H., Lestari, T. D., Sriwijaya, P. N., Ps, A., Sektor, A., Politeknik, P., & Sriwijaya, N. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3). <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342>
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran

- Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Hermanto, C. B. (2020). Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Pertanggungjawaban Anggaran dengan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survey di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 40–56. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Karima, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Mikoshi, M. S. (2020). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat)*. 4(1), 192–199. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*,4(1),192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Oktaviani, S. (2020). Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Sin. *Juhanperak*,484–494. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/894>
- Rininda, B. P., & Sudaryati, E. (2020). Pengaruh Ketepatan Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *E-JurnalAkuntansi*,30(5),1099. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p03>
- Pratama Rio, Henri Agustin, S. T. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*,1(1),429–444. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/85/52>
- Wisdaningrum, O. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Sistem Pengukuran Anggaran, dan Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Akuntansi*

Dan Pajak, 22(22), 1–13.

Nicken Destriana, (2015). Pengaruh Debt To Ecuity Ratio, Deviden And Factor Non Keuangan Terhadap Agency Cost. *jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 17(2), 125-126.

sitika.batangkab.go.id. Data Seputar Kabupaten Batang. Diakses pada 15 November 2022, dari <http://sitika.batangkab.go.id/>

inspektorat.jatengprov.go.id. Diakses pada 15 November 2022, dari <https://inspektorat.jatengprov.go.id/17/>

kemenkeu.go.id. Diakses pada 15 November 2022, dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>

Azlina, N., & Amelia, I. (2015). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 12(2), 32. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1409>

Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Indriana, & Nasrun, M. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 19–26. <http://journal.stiem.ac.id/index.php/jureq/article/view/330>

Mufidah, T. N. (2022). Implementasi Good Governance Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 11, No, 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34723>

Sidasa Kabupaten Batang. Data Analisa Kabupaten Batang. Diakses pada 10 Februasi 2023, dari <https://data-analisa.batangkab.go.id/>